



Hasil

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH



◆ Pada Masa Kegiatan Anggota Ke Daerah Pemilihan
Periode 2 Oktober - 21 Oktober 2025

**MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025-2026**

REDAKSI

PENASIHAT

DR. SRI SUNDARI, SH., MM., CGCAE
LALU NIQMAN ZAHIR, S.SOS., M.SI
ONI CHOIRUDDIN S.H., M.H.
DR. SRI SUNDARI, SH., MM., CGCAE

PENANGGUNG JAWAB

SYULFAH SARI DEWI SYAM, S.E., M.M
DR. RAHMAT HOLLYSON MAIZA, M.AP

PIMPINAN REDAKSI

MARTHEN S. RUNDUPADANG, S.H., M.H.
DRA. MEDIANA PONGSITANAN, S.H., M.H.
ANDIKA PRIMA SARI, S.I.P., M.SI

REDAKTUR PELAKSANA

NOVI ALVISAH YUSAMMI, S.E., M.M.

STAF REDAKSI

ARIE AAT HARTADI, S.E., M.A.
FANDI RIZKI ROSYARI, S.I.P., M.TR.AP.
KHALIZZAD KHALIS, S.M.B., M.TR.AP.
NANDA PUSPITA, S.E., M.A.
NUNUNG ARIYANI, S.E., M.A.
ROSDIANA RIZAL, S.H., M.A.
KHUSNI TAMRIN. S.SOS.
RINDANG MUSTIKAWATI, S.E.
MOH.YUSUF, S.H.
EDRIDA PULUNGAN, S.E., M.H.I., M.SI.E
IRMA ARTANASTITI, S.H.
MARDYANA MALAWAT, S.H.
AMALIA HASRI, S.E.
DIDIN DARMAWAN, S.KOM.

TUNKI RACHMAN SANUSI, S.H.
ZYAT INTAN DELIMASARI, S.E.
HAVIVA AMALIA N.P, S.PD.
MUHAMMAD IRZA, S.H.
YENNY ANGGRAENI, S.SOS
IWUK ANGGERTINA
AJENG PUTRI AYU W, S.I.P.
DIANA SEPTAVIANA, S.H., M.H
RYANTI RAMADANI, S.KOM.
LITA VIERYNA, S.KOM.
RAMA DHESRIYAN, S.I.P.
RAHMADIANSYAH, S.I.P.



TATA LETAK DAN DESAIN

FANDI RIZKI ROSYARI, S.I.P., M.TR.AP.
NANDA PUSPITA, S.E., M.A
AIDA FITRIS AHMALIA, S.I.P.

ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH

Sumber Legitimasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Konstitusional DPD RI

Anggota DPD RI

Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

(Pasal 258 poin h UU MD3)

Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

(Pasal 258 poin i UU MD3)

DPD RI

DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi.

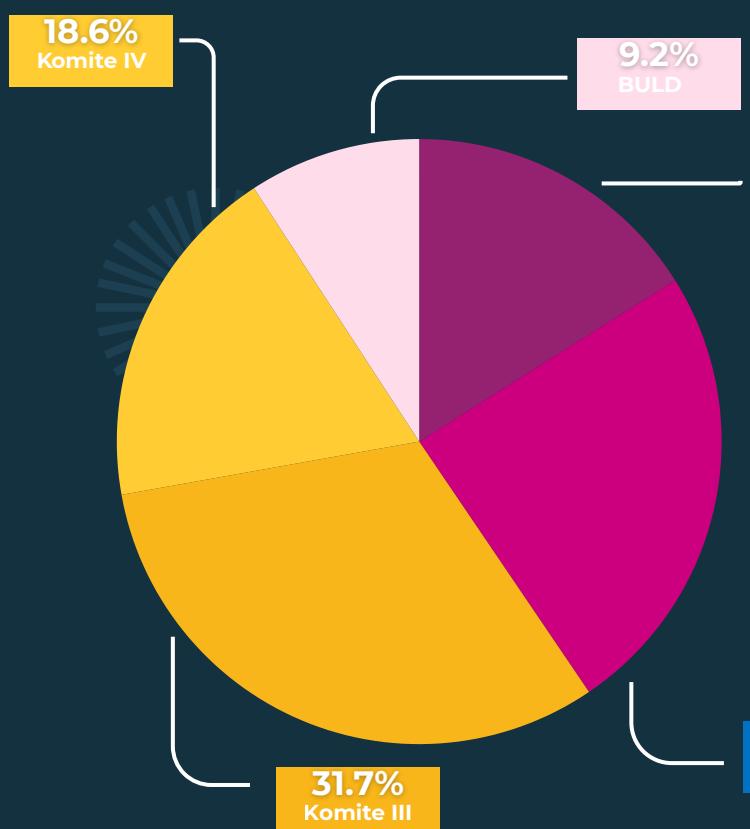
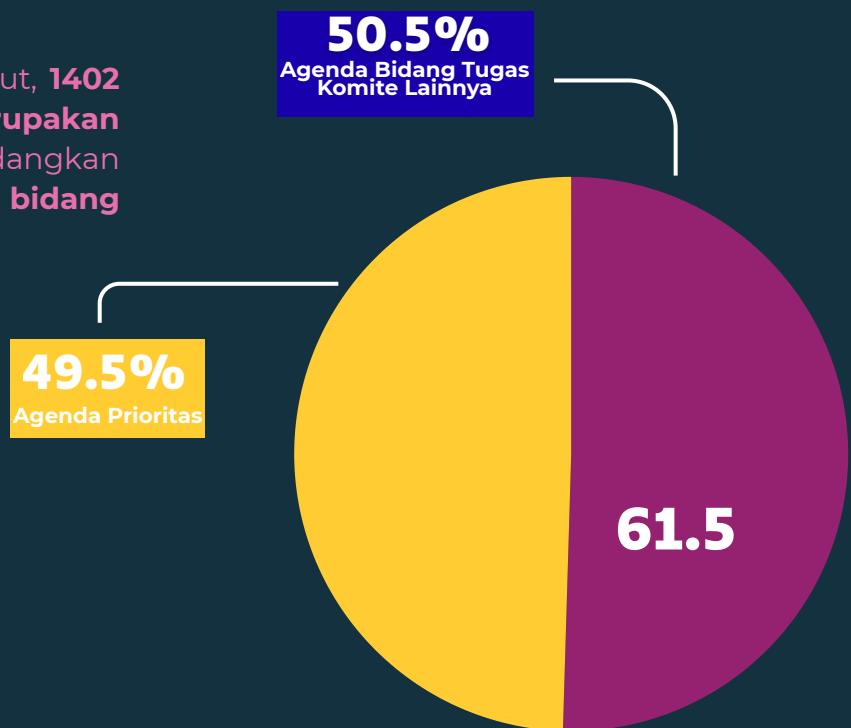
DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah

(Pasal 237 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)

(Pasal 237 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)

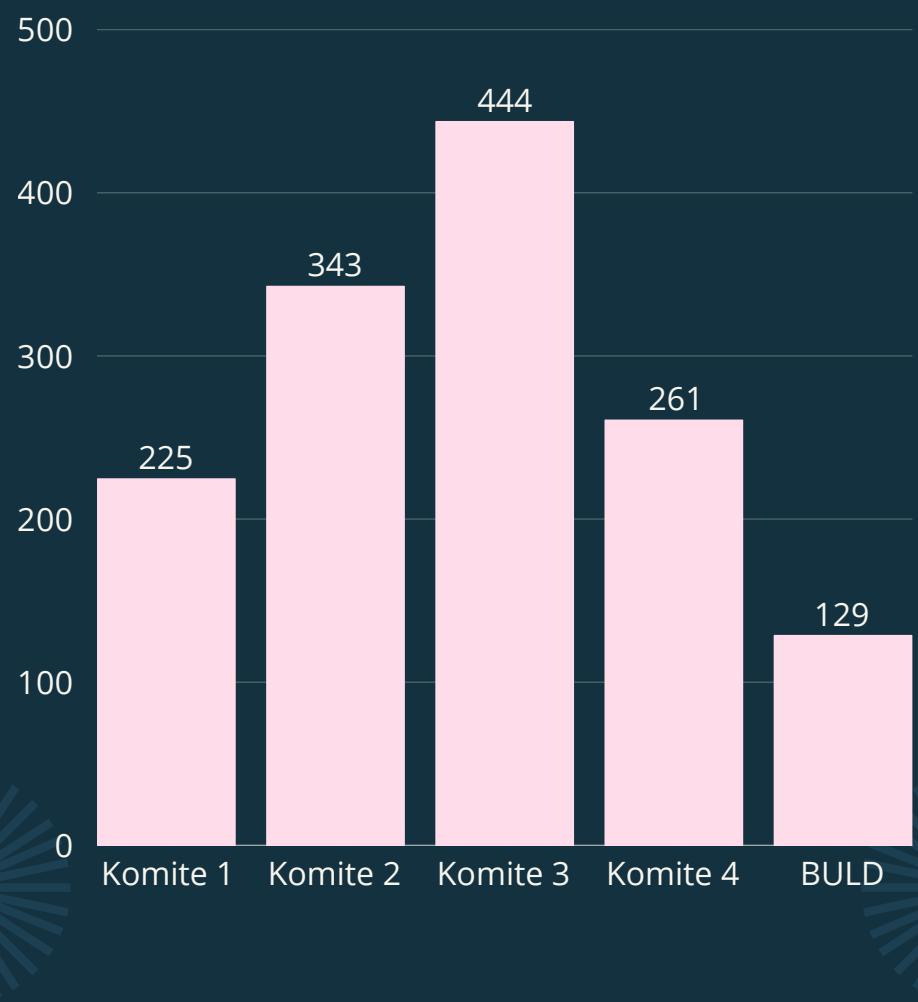
TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2025-2026 yang telah diserap adalah sebanyak 2831 aspirasi

Dari total aspirasi 2831 tersebut, **1402 aspirasi** diantaranya merupakan **agenda prioritas** komite sedangkan **1429** nya adalah **agenda bidang tugas komite lainnya**.



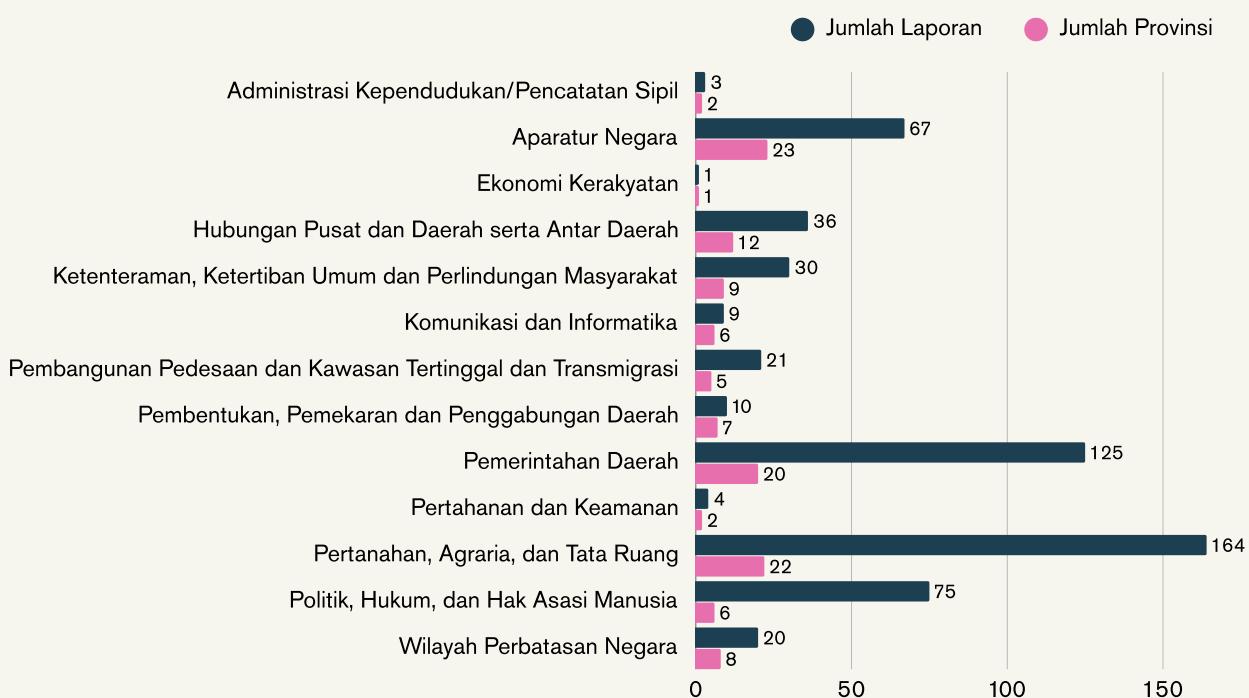
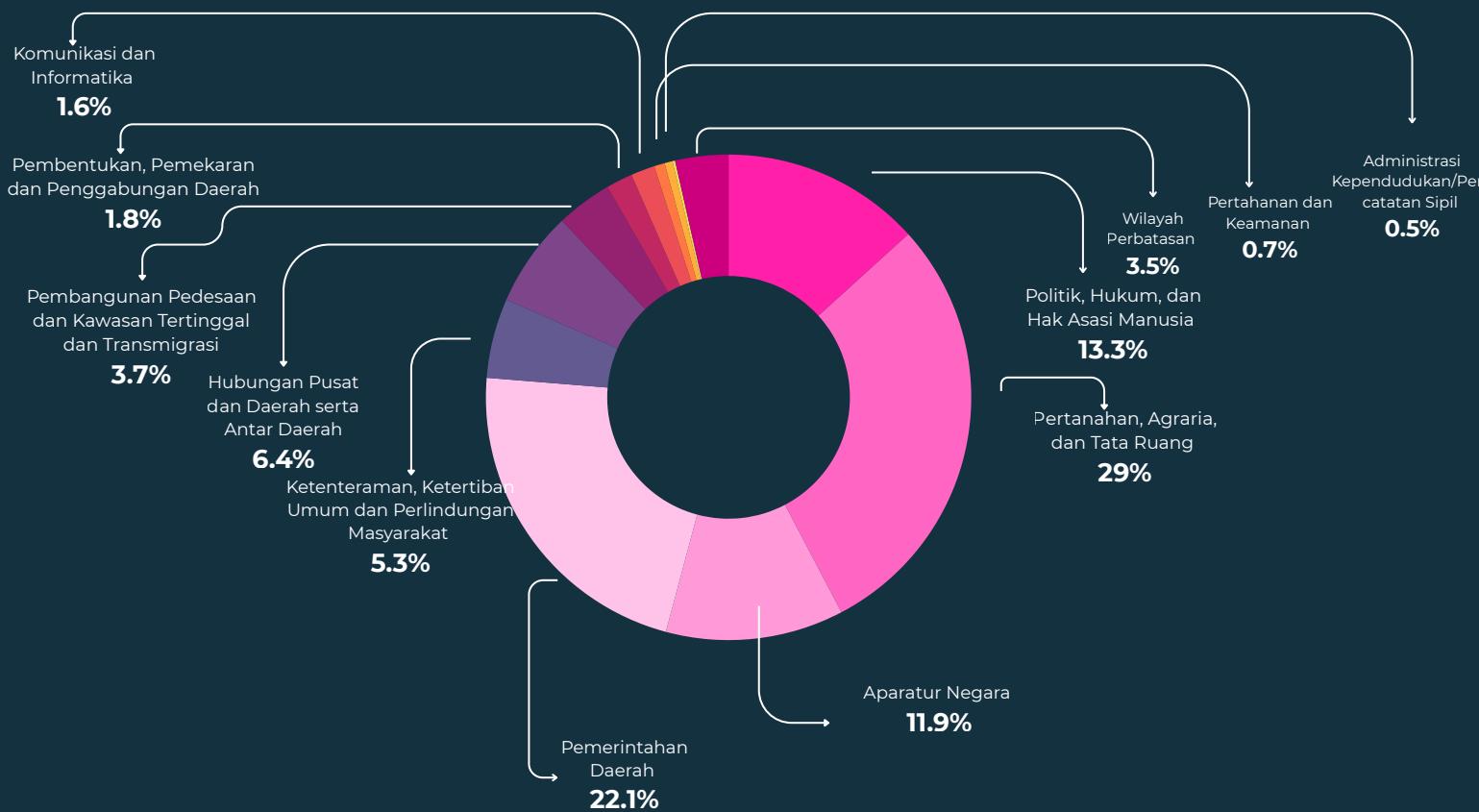
Dari 1402 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, jumlah **terbesar merupakan aspirasi aspirasi Komite III 444 aspirasi**, Komite II sebanyak 343 aspirasi Komite IV 261 aspirasi, , Disusul, Komite I sebesar 225 aspirasi, dan BULD sebesar 129 aspirasi.

TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2025-2026 yang telah diserap adalah sebanyak 2831 aspirasi.



Dari total 2831 aspirasi, **jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 444 aspirasi**, Komite II sebanyak 343 aspirasi, Komite IV 261 aspirasi, Komite I sebesar 225 aspirasi, dan BULD sebesar 129.

ASPIRASI KOMITE I



1.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria



- Tumpang tindih konsesi PT Mayawana Persada dengan wilayah adat dan lahan kelola masyarakat Dayak Kualan, yang menimbulkan perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan kriminalisasi terhadap warga.
- Ketidakjelasan batas wilayah Pulau Pabelokan menyebabkan Banten tidak menerima DBH migas yang seharusnya menjadi haknya.
- Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dan sertifikat yang diterbitkan dinilai cacat administrasi dan hukum, sehingga bertentangan dengan bukti penguasaan sah masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi warga.

2.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

- Pengawasan terhadap pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Pari merusak ekosistem pesisir dan mengganggu mata pencaharian warga.
- Memperkuat pengawasan ketidakjelasan batas wilayah di Kecamatan Sajingan Besar memicu konflik antar-desa dan kerawanan keamanan di kawasan perbatasan dengan Malaysia.
- Memperkuat pengawasan pada aktivitas penyelundupan dan perdagangan ilegal di perbatasan Kalimantan Barat terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola kawasan perbatasan.



3.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- Terjadi ketidakjelasan dan perbedaan penetapan administratif atas Pulau Pengekek Besar dan Kecil antara Kalbar dan Kepri sehingga memicu sengketa wilayah dan ketidakpastian hukum.
- Pengawasan pelaksanaan UU menjadi lemah di Mentawai karena kondisi geografinya yang terdiri dari banyak pulau kecil, garis pantai panjang, dan wilayah laut yang luas.
- Penguatan pengawasan terhadap ketersediaan air bersih di Karimunjawa sangat terbatas, sehingga warga membuat sumur galian yang berisiko terintrusi air laut dan mengancam kondisi wilayah.

**ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
AGENDA
PRIORITAS**

4.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berisiko melemahkan otonomi fiskal dan menurunkan kualitas pelayanan publik, terutama di daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas.
- Penurunan TKD sebesar Rp522 miliar membuat ruang fiskal Kalbar menyempit, menghambat program pembangunan dan menunjukkan tingginya ketergantungan daerah pada transfer pusat.
- Tingginya ketergantungan Bali pada TKD menimbulkan kekhawatiran bahwa pemotongan transfer pusat akan mengganggu pembiayaan layanan dasar, pariwisata, desa adat, dan perlindungan lingkungan.

5.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

- Kendala teknis dalam seleksi PPPK 2024 seperti kesalahan data, dan mekanisme afirmasi yang tidak konsisten dalam seleksi PPPK 2024 mengurangi kepercayaan peserta dan menghambat reformasi ASN.
- Ketidakterpaduan data honorer antara daerah dan BKN membuat banyak tenaga honorer tidak terverifikasi dan berpotensi kehilangan hak mengikuti seleksi PPPK.
- Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kesulitan memenuhi formasi ASN di sektor strategis karena rendahnya minat penempatan di wilayah terpencil akibat keterbatasan fasilitas, akses transportasi dan komunikasi, serta minimnya insentif.



**ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
AGENDA
PRIORITAS**

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 1

1 Administrasi Kependudukan /Pencatatan Sipil

- Pengawasan terhadap percepatan pelayanan pembuatan KTP oleh Disdukcapil dengan mekanisme jemput bola.
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan untuk meminimalisasi keterlambatan pembaruan dokumen, maraknya calo, dan keterbatasan layanan teknologi.

2 Aparatur Negara

- Seleksi PPPK 2024 di Kalimantan Barat terkendala jaringan, kesalahan administrasi, dan mekanisme afirmasi yang belum optimal.
- Ketidakselarasan data honorer antara daerah dan BKN menyebabkan banyak tenaga honorer—terutama R2–R4—tidak terverifikasi dan kehilangan hak mengikuti PPPK.
- Beberapa daerah terkendala batas anggaran belanja pegawai sehingga tidak mampu mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK penuh waktu.

3 Ekonomi Kerakyatan

- Pemberdayaan ekonomi perempuan dan UMKM desa

4 Hubungan Pusat dan Daerah serta Antar Daerah

- Peningkatan kemandirian daerah serta penyelarasan kewenangan provinsi-kabupaten/kota dan penyelarasan produk hukum daerah terhadap pusat.
- Pengawasan terhadap penurunan TKD sebesar ±Rp522 miliar yang membuat APBD Kalbar turun signifikan dan ruang fiskal semakin sempit.
- Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pusat untuk mengatasi pendangkalan alur dermaga Pulau Baai serta mempercepat RDTR dan peningkatan konektivitas Pulau Enggano.



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 1

5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Penguatan pengawasan pada kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan dengan prevalensi sekitar 5% di atas rata-rata nasional serta maraknya peredaran sabu dan ekstasi.
- Pengawasan terhadap maraknya eksploitasi anak dan pekerja anak di bawah umur di Kota Denpasar, Bali.
- Penguatan pengawasan terhadap proses rekrutmen calon polisi

6 Komunikasi dan Informatika

- Kerugian finansial serta potensi kriminalitas dan masalah sosial akibat maraknya judi online di Sumatera Selatan dengan lebih dari 118.000 pemain.
- Kabupaten Malinau masih menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan ketergantungan pada satu jalur fiber optik, sehingga gangguan jaringan dapat melumpuhkan layanan komunikasi secara luas.
- Kebutuhan tower internet untuk desa karena sudah satu tahun lebih warga hanya mengandalkan Starlink.

7 Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal dan Transmigrasi

- Permasalahan pertanian seperti kbutuhan pengeringan kolam penampungan air irigasi, pengajuan bantuan alokasi pupuk terkendala, bantuan bibit padi sering terlambat lewat dari masa tanam.
- Peningkatan kesejahteraan guru honorer di tingkat desa.
- Peningkatan pengawasan terhadap perbaikan infrastruktur jalan desa.

8 Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah

- Pertimbangan terhadap pemekaran Kepulauan Taka Bonerate karena jarak antarpulau yang jauh menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan terhambat.
- Kabupaten Ketapang mengusulkan pemekaran menjadi tiga DOB (Jelai Kendawangan Raya, Matan Hulu, Hulu Aik).
- Moratorium pemekaran belum dicabut, kesiapan administratif belum lengkap (kajian, batas wilayah, lahan ibu kota, komitmen fiskal),



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 1

9 Pemerintahan Daerah

- Pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan belum optimal
 - Minimnya dukungan untuk UMKM
 - Kebijakan afirmasi perempuan
 - Bantuan perumahan layak.
-

10 Komunikasi dan Informatika

- Ketahanan sosial dan keamanan masyarakat melemah
 - maraknya narkoba dan konflik lahan
 - Timbulnya keresahan masyarakat
 - Ketidakstabilan sosial.
-

11 Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang

- Penyediaan air bersih belum merata dan penyelesaian sengketa lahan lambat
 - Menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik sosial.
-

12 Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

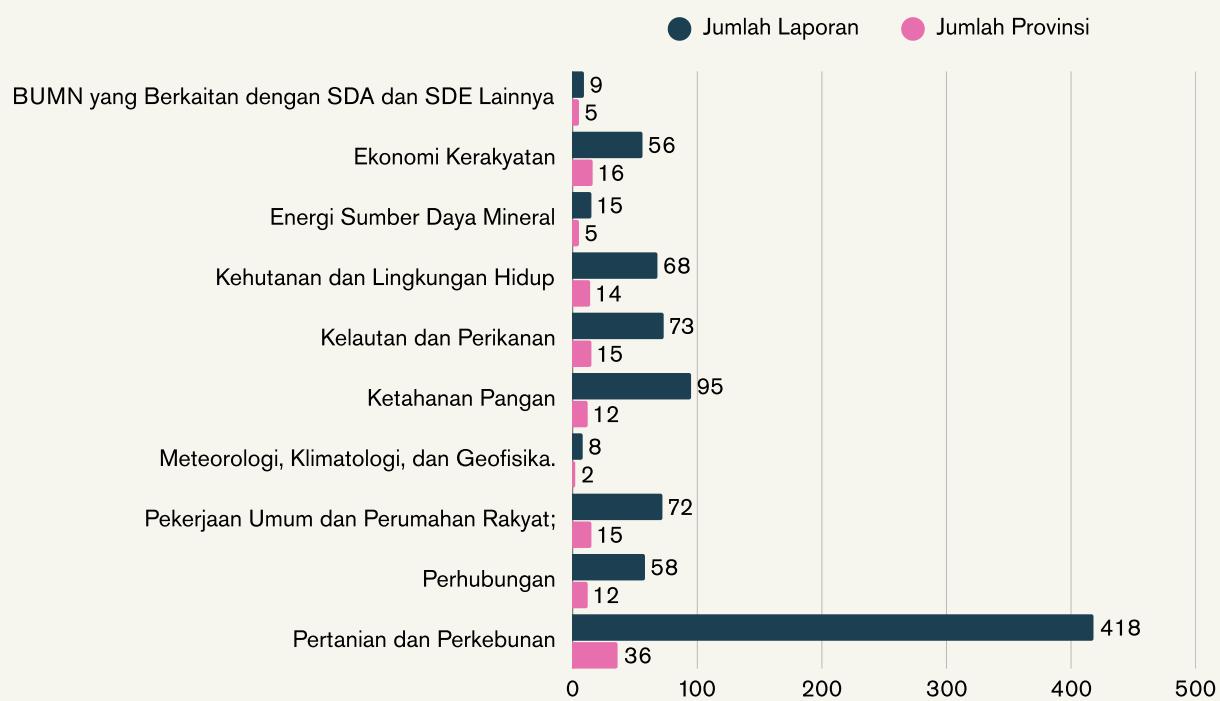
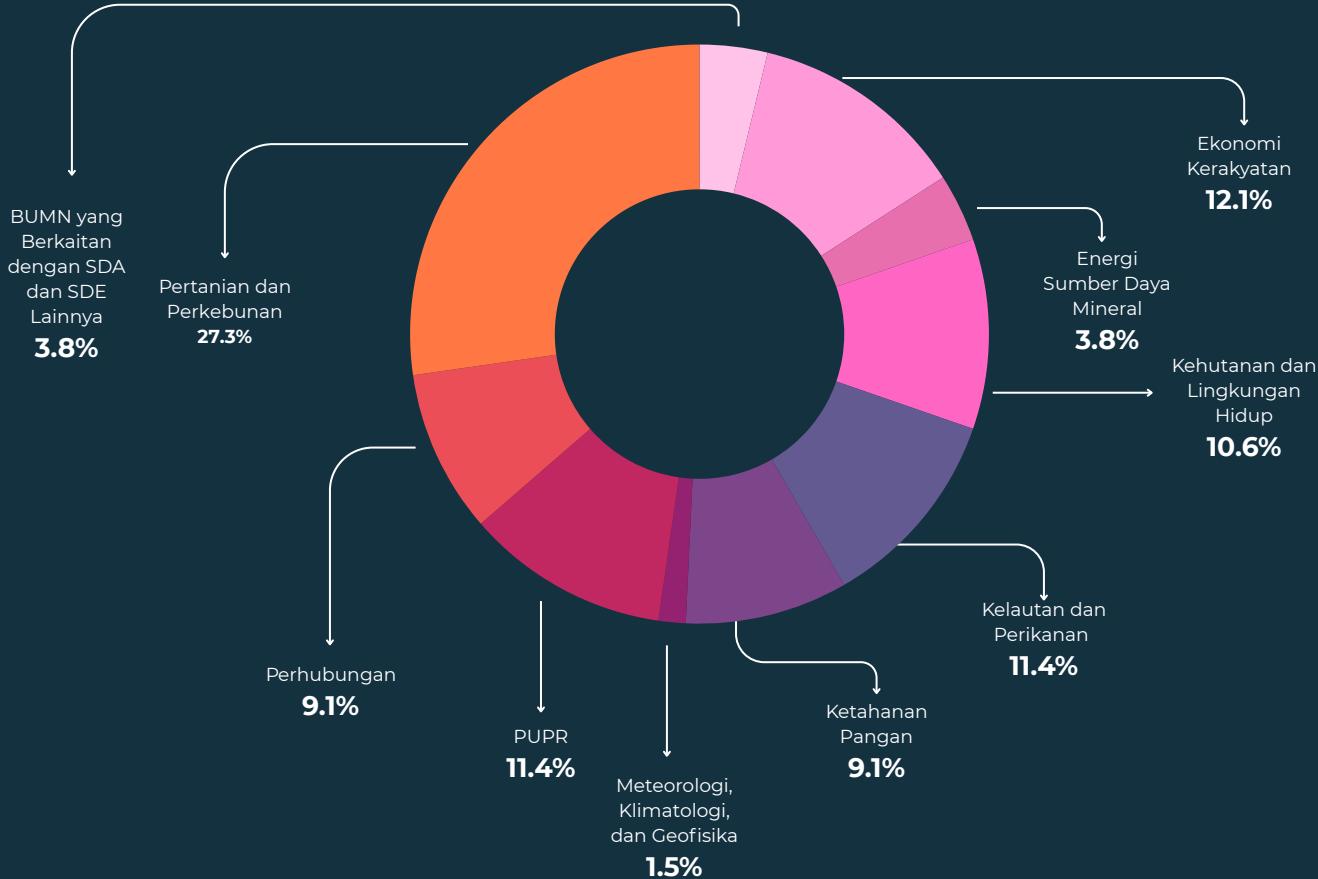
- Rendahnya kesejahteraan nelayanan dan masyarakat
 - Terjadinya konflik lahan
 - Terbatasnya infrastruktur
 - Lemahnya pengawasan aktivitas ekonomi.
-

13 Wilayah Perbatasan Negara

- Rendahnya kesejahteraan nelayanan dan masyarakat
- Terjadinya konflik lahan
- Terbatasnya infrastruktur
- Lemahnya pengawasan aktivitas ekonomi.



ASPIRASI KOMITE II



1.

UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- Petani Jayapura terkendala pupuk yang langka dan mahal serta distribusi logistik yang rumit dan mahal, sehingga menghambat akses pembiayaan, produksi, dan pencapaian program ketahanan pangan.
- Pemprov Papua Selatan menghadapi tarik ulur investasi/PSN dan kewajiban melindungi lahan pertanian rakyat, ditambah masalah harga komoditas, distribusi pupuk, lemahnya kelembagaan petani, serta meningkatnya konflik agraria.
- Kabupaten Natuna menghadapi tantangan ketahanan pangan akibat minimnya lahan produktif, sulitnya akses logistik antar pulau, kurangnya tenaga penyuluh, serta belum optimalnya penggunaan data FSVA dalam perencanaan sektor pangan.



2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- Masyarakat di Lebak, Pandeglang, dan Serang khawatir karena izin perkebunan besar mudah diberikan sehingga mengancam tanah ulayat dan lahan garapan warga.
- Penguatan pengawasan terhadap peran pemerintah sebagai mediator yang diharapkan adil dan menindak tegas perusahaan yang melanggar serta melindungi hak masyarakat adat/petani kecil dengan memperkuat pasal-pasal UU Cipta Kerja terkait Perkebunan ditinjau ulang.
- Harga komoditas seperti kopra, cengkeh, dan kelapa perlu distabilkan dan diupayakan meningkat untuk melindungi pendapatan pekebun kecil.
- Penguatan pengawasan oleh pemerintah untuk mencegah monopoli pabrik.

ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
AGENDA
PRIORITAS

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 2

1 BUMN Yang Berkaitan Dengan SDA dan SDE Lainnya

- Mendorong regulasi dan pengawasan sinergi BUMN-daerah pengelolaan lahan serta percepatan regulasi dan pengawasan pemindahtanganan lahan BUMN.
- Mendorong regulasi dan pengawasan pemerataan infrastruktur telekomunikasi daerah.
- Mendorong regulasi, anggaran, dan pengawasan percepatan listrik pedesaan terpencil.

2 Ekonomi Kerakyatan

- Mendorong regulasi tata niaga dan pengawasan harga komoditas.
- Mendorong fleksibilitas regulasi, hormati keberhasilan BUMDes dan koperasi.
- Mendorong regulasi pembiayaan awal koperasi dan pengawasan implementasinya.
- Mendorong regulasi, anggaran, dan pengawasan penguatan koperasi daerah.

3 Energi Sumber Daya Mineral

- DPD RI memfasilitasi dialog, pengawasan AMDAL, dan lindungi hak masyarakat.
- Mendorong revisi regulasi tambang berkelanjutan dan pengawasan infrastruktur pendukung.
- DPD RI dorong regulasi reklamasi produktif dan awasi implementasi pascatambang.

4 Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- DPD RI mendorong regulasi perlindungan hutan adat dan pengawasan ketat eksploitasi.
- Mendorong regulasi tegas dan awasi penegakan hukum tambang ilegal.
- DPD RI dorong regulasi pengelolaan sampah dan awasi implementasi TPS3R.



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 2

5 Kelautan dan Perikanan

- Mendorong regulasi dan pengawasan pembangunan pelabuhan nelayan daerah.
- Mendorong regulasi dan pengawasan perlindungan serta asuransi nelayan.
- DPD RI mendorong regulasi dan pengawasan pos checkpoint perairan Selayar.

6 Ketahanan Pangan

- DPD RI mendorong regulasi dan pengawasan efektif pelaksanaan Program MBG.
- Mendorong regulasi dan pengawasan sinergi UMKM-koperasi berbasis digital.
- DPD RI awasi standar mutu dan stabilisasi harga beras Bulog.

7 Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- DPD RI dorong regulasi adaptasi iklim dan pengawasan drainase perkotaan.
- Mendorong regulasi adaptasi iklim dan pengawasan tata ruang perkotaan.
- Pengawasan pembangunan berkelanjutan daerah.

8 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- DPD RI dorong realokasi anggaran dan awasi prioritas infrastruktur daerah.
- DPD RI mendorong regulasi, anggaran, dan pengawasan pembangunan terpadu daerah.
- Mendorong regulasi, pengawasan Otsus, dan pendampingan pemberdayaan ekonomi kampung.



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 2

9 Perhubungan

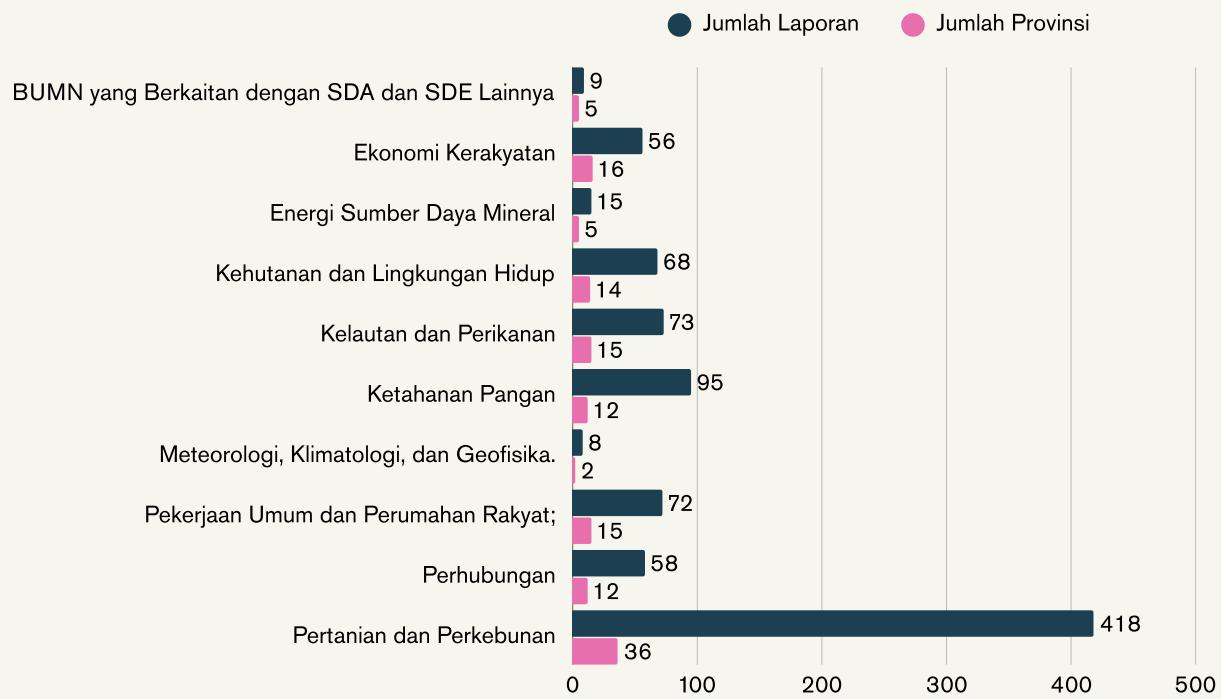
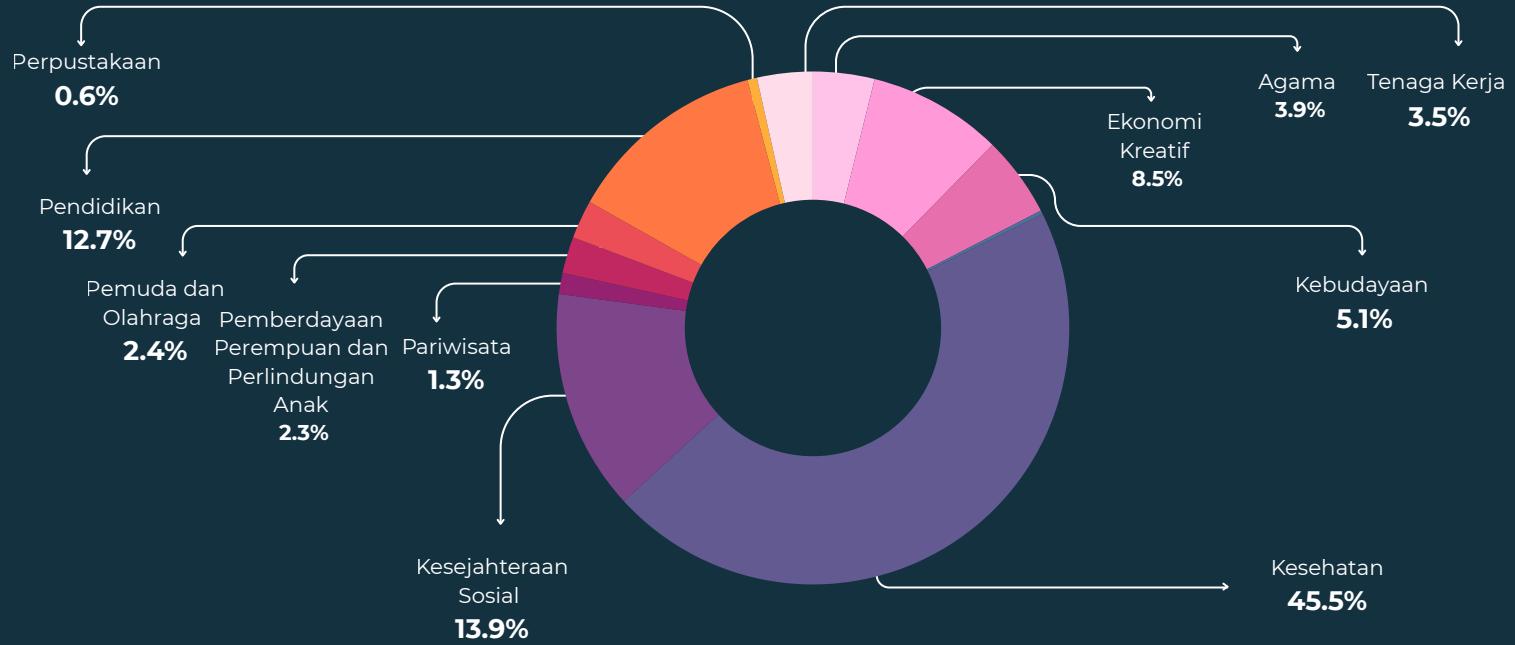
- DPD RI dorong anggaran dan pengawasan perbaikan irigasi nasional.
- DPD RI dorong anggaran dan pengawasan perbaikan jalan usaha tani.
- Mendorong pengawasan regulasi tarif buruh angkut dan pengawasan.

6 Pertanian dan Perkebunan

- DPD RI mengawasi pembagian kewenangan alsintan sesuai UU 23/2014.
- Penguatan pengawasan terhadap kewenangan daerah dan sinkronkan kebijakan pertanian berbasis kebutuhan.
- Mendorong regulasi, pengawasan, dan layanan purna jual alsintan.



ASPIRASI KOMITE III



1.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Lemahnya penerapan standar keamanan pangan dan kompetensi tenaga penyedia MBG, yang berakibat pada maraknya kasus keracunan di sekolah.
- Keterbatasan kapasitas laboratorium dan lemahnya sistem pengawasan lintas instansi yang masih bersifat reaktif.



2.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terkait Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk Korban Narkotika dan Obat Terlarang



- Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.
- Lemahnya Upaya Pencegahan dan Edukasi Sosial terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

3.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Implementasi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum berjalan secara optimal.
- Kelembagaan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya BPKN dan BPSK, masih menghadapi kendala struktural dan fungsional yang menghambat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
AGENDA
PRIORITAS**

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 3

1 Pendidikan

- Banyak guru honorer bergaji di bawah UMR dan distribusi tenaga pendidik belum merata, terutama di daerah 3T.
- Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Banyak sekolah dasar dan menengah rusak serta minim fasilitas pendukung, sehingga menghambat mutu pembelajaran.

2 Kesehatan

- Program edukasi kesehatan yang masih rendah.
- Akses dan fasilitas kesehatan dan program edukasi kesehatan yang masih rendah

3 Kesejahteraan Sosial

- Masyarakat terutama di daerah 3T menghadapi keterbatasan akses terhadap program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
- Terdapat ketidakakuratan dan ketidaksinkronan data kesejahteraan, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

4 Agama

- Anggaran pembinaan umat dan pelatihan dai/penyuluhan agama masih sangat terbatas, terutama untuk wilayah terpencil.
- Penanganan aliran sesat dan radikalisme lemah karena minim koordinasi dan dasar hukum.
- Program dakwah kreatif untuk generasi muda masih kurang.
- Fasilitas gereja kurang memadai (ruang ibadah & sarana pemuda). Partisipasi generasi muda perlu ditingkatkan.
- Jemaat berharap dukungan pemerintah dan lembaga gereja untuk program pemberdayaan, sarana ibadah, dan penguatan kapasitas pelayanan.



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 3

5 Ekonomi Kreatif

- Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dengan memberdayakan UMKM Kota Makassar.
- Perlindungan merek dagang untuk menjaga nilai produk dan daya saing di era digital.
- Penguatan pengawasan perlindungan konsumen terhadap kasus manipulasi, penipuan, atau penyalahgunaan undian.

6 Kebudayaan

- Dukungan anggaran dan fasilitas seni masih sangat minim (panggung, ruang latihan, kegiatan rutin).
- Regenerasi pelaku seni muda lemah karena kurang insentif dan pendidikan budaya.
- Komunitas Seni Musik Islam Lampung Tengah meminta dukungan pemerintah untuk pelaku seni religi.

7 Keluarga Berencana

- Akses layanan KB masih terbatas di desa, terutama untuk metode jangka panjang (IUD/implan).
- Kurangnya edukasi kependudukan dan literasi keluarga bagi remaja, sehingga risiko pernikahan & kehamilan dini masih tinggi.
- Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program KB karena menjamurnya persepsi bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan.

8 Pariwisata

- Meningkatkan dukungan untuk pelaku senin musik islam di Lampung Tengah.
- Memfasilitasi dukungan untuk pemberdayaan seni musik religi.
- Mendorong penyusunan regulasi yang ramah investasi dan melakukan pengawasan agar pemerintah daerah menyediakan infrastruktur dasar serta kemudahan perizinan untuk menarik investor ke Selayar.



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 3

9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan terjangkau sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan partisipasi pelatihan kerja.
- Mendorong penguatan regulasi dan memastikan pengawasan anggaran daerah agar program pelatihan keterampilan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga berjalan efektif dan tepat sasaran.

10 Pemuda dan Olahraga

- Mendorong penyusunan regulasi pendukung program pembinaan pemuda dan pengawasan agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas, pendanaan, serta ruang kegiatan yang memadai bagi komunitas Camp Pria Sejati Papua Selatan.
- Mendorong penyusunan regulasi pencegahan narkoba berbasis komunitas dan memperketat pengawasan lintas lembaga agar program Jarwasnaba berjalan efektif dan perlindungan pemuda dapat diperkuat.

11 Tenaga Kerja

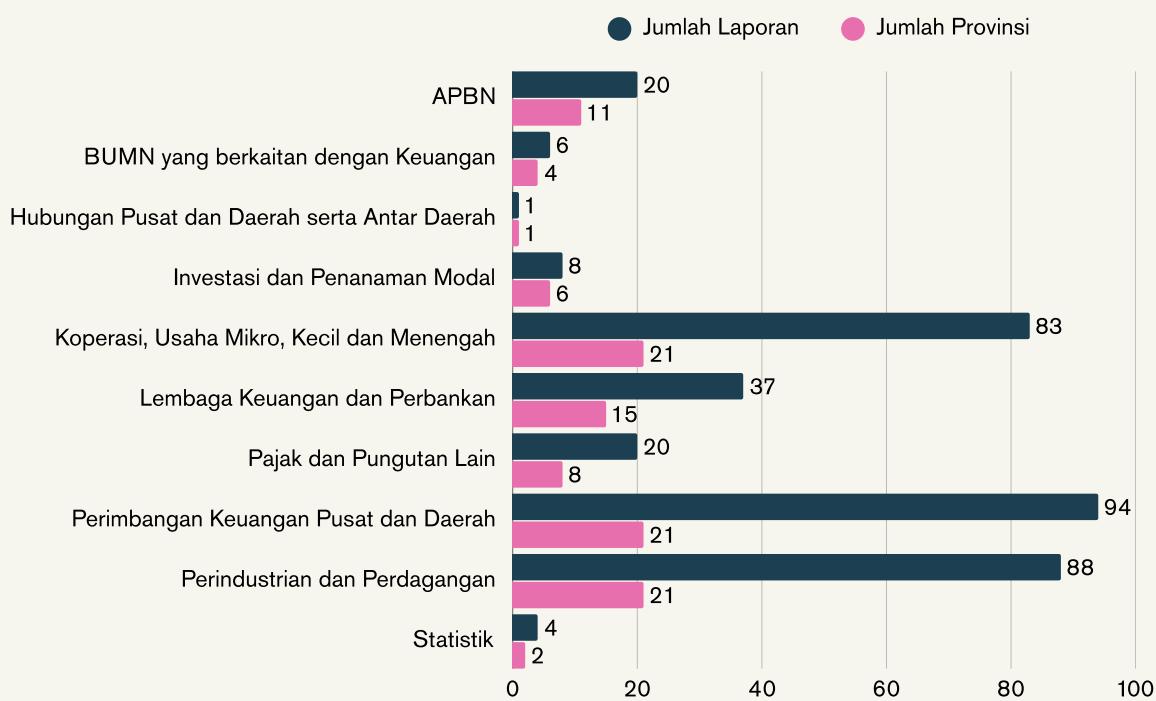
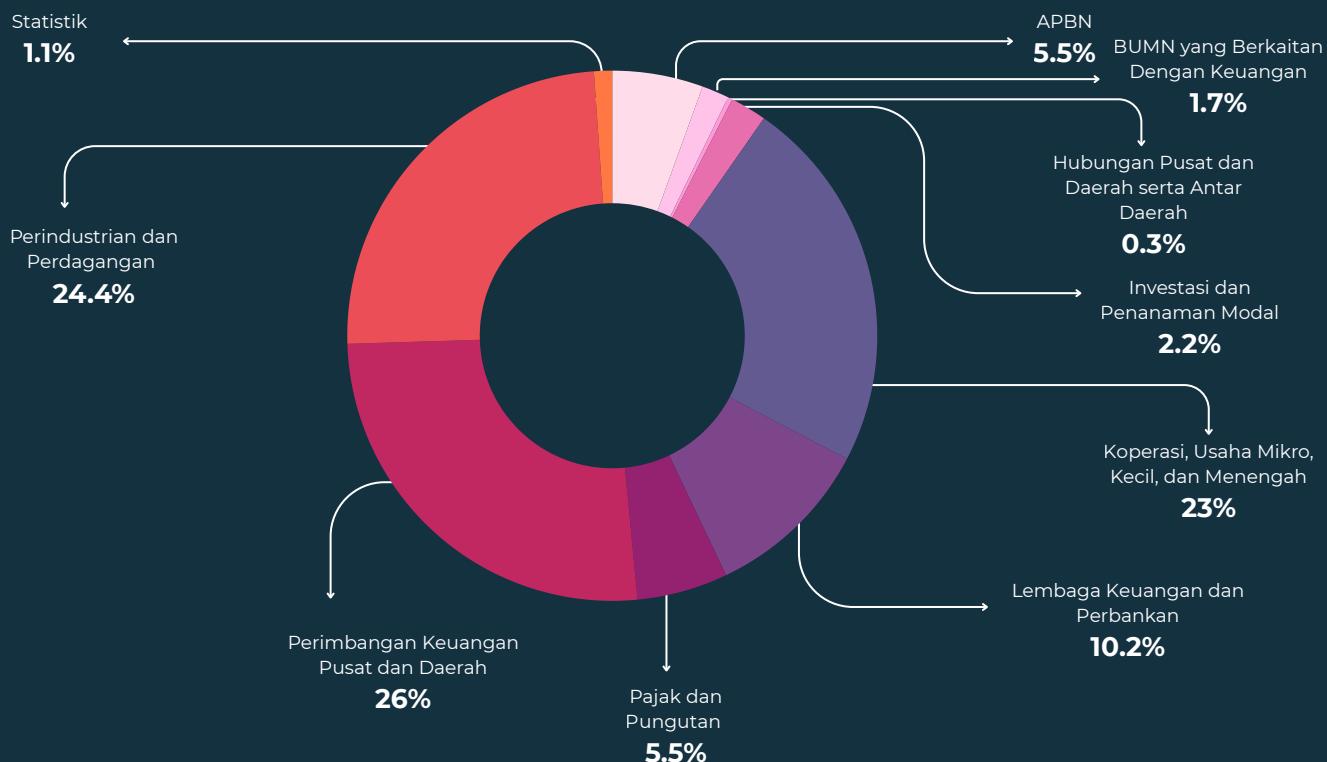
- Mengawasi implementasi program peningkatan keterampilan serta penguatan UMKM agar masyarakat Kadu Agung memperoleh akses kerja dan peluang usaha yang lebih merata.
- Mendorong revisi regulasi pendidikan dan memperketat pengawasan pemerintah pusat/daerah agar perlindungan hukum, kesejahteraan, akses pelatihan, serta kuota pengangkatan ASN/PPPK bagi guru non-ASN benar terpenuhi dan berpihak pada tenaga pendidik daerah.

12 Pariwisata

- Pengawasan anggaran perpustakaan daerah untuk memperluas akses, memperkuat digitalisasi layanan, menambah tenaga pustakawan kompeten, serta memastikan keberlanjutan program literasi dan kolaborasi komunitas di seluruh daerah.
- Pengawasan pemenuhan infrastruktur internet kampus melalui fungsi legislasi dan pengawasan dalam satu kebijakan terintegrasi.



ASPIRASI KOMITE IV



1.

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Mendorong penguatan BPSK, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan dan sosialisasi regulasi perlindungan konsumen agar penegakan terhadap pelaku usaha lebih efektif dan hak konsumen terlindungi.
- Mendorong penguatan pengawasan barang beredar dan aktivasi BPSK, termasuk percepatan uji laboratorium serta penindakan tegas terhadap pelanggaran untuk melindungi konsumen.



2.

Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)



- Mendorong perluasan inovasi fiskal tanpa menambah beban pajak, peningkatan PAD sektor strategis melalui insentif pusat, penguatan digitalisasi pajak daerah, integrasi pendataan wajib pajak, serta pendampingan penyusunan Perda sesuai UU HKPD.
- Diperlukan dukungan teknologi, infrastruktur digital, dan pelatihan teknis untuk mempercepat penerapan sistem pelaporan keuangan elektronik seperti Online Monitoring SPAN di seluruh daerah.
- Daerah butuh ruang inovasi PAD dan dukungan pusat untuk sektor strategis.
- Mendorong digitalisasi pajak, pendataan terpadu, dan asistensi penyusunan Perda HKPD.

3.

Pengawasan DPD RI atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Penguatan pengawasan terhadap hilirisasi, digitalisasi, industri hijau, dan penguatan UMKM. Selain itu, juga perlu memperhatikan sinergi pusat-daerah-pelaku usaha untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
- Mendorong regulasi dan pengawasan pembiayaan serta insentif teknologi ramah lingkungan agar IKM mampu bertransformasi menuju digitalisasi dan industri hijau.
- Mendorong regulasi dan pengawasan terpadu agar program UMKM-IKM antar-kementerian dan pemda tersinergi melalui forum koordinasi dan integrasi data bantuan.

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 4

-
- 1 BUMN yang berkaitan dengan Keuangan**
- DPD RI dapat mendorong penambahan alokasi anggaran UMi melalui fungsi legislasi dan mengawasi realisasi penyalurannya agar tepat sasaran bagi pelaku ultra mikro.
-
- 2 Investasi dan Penanaman Modal**
- Pengawasan terhadap proses penataan ulang dan percepatan fasilitas agar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat lokal.
 - Memberikan rekomendasi legislasi tambahan untuk memastikan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha berjalan efektif dan tepat sasaran.
-
- 3 APBN**
- Mendorong revisi dan pengawasan regulasi pendanaan ASN/PPPK agar pemerintah pusat menjamin alokasi anggaran yang tidak membebani fiskal daerah.
 - Mendorong pengawasan intensif terhadap bank Himbara penerima dana Rp200 triliun agar penyaluran kredit di Kalimantan Utara transparan, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Perlu optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak-retribusi, penyederhanaan regulasi, dan kerja sama pemda-swasta.
-
- 4 Hubungan Pusat dan Daerah serta Antar Daerah**
- Pengawasan terhadap pemberian dukungan khususnya dalam hal akses permodalan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha.
-
- 5 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
- Mendorong regulasi afirmatif dan meningkatkan pengawasan layanan perbankan serta pendampingan UMKM OAP secara berkelanjutan
 - Mendorong penyempurnaan regulasi dan memperkuat pengawasan untuk meningkatkan akses pembiayaan, kapasitas usaha, dan pemasaran UMKM.

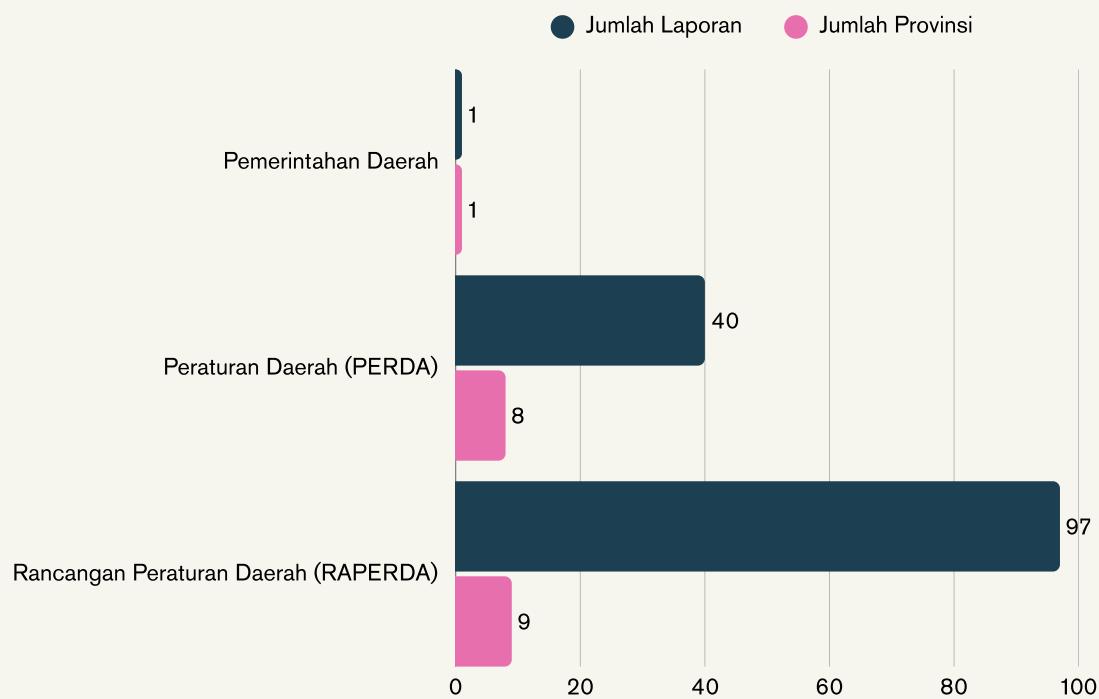
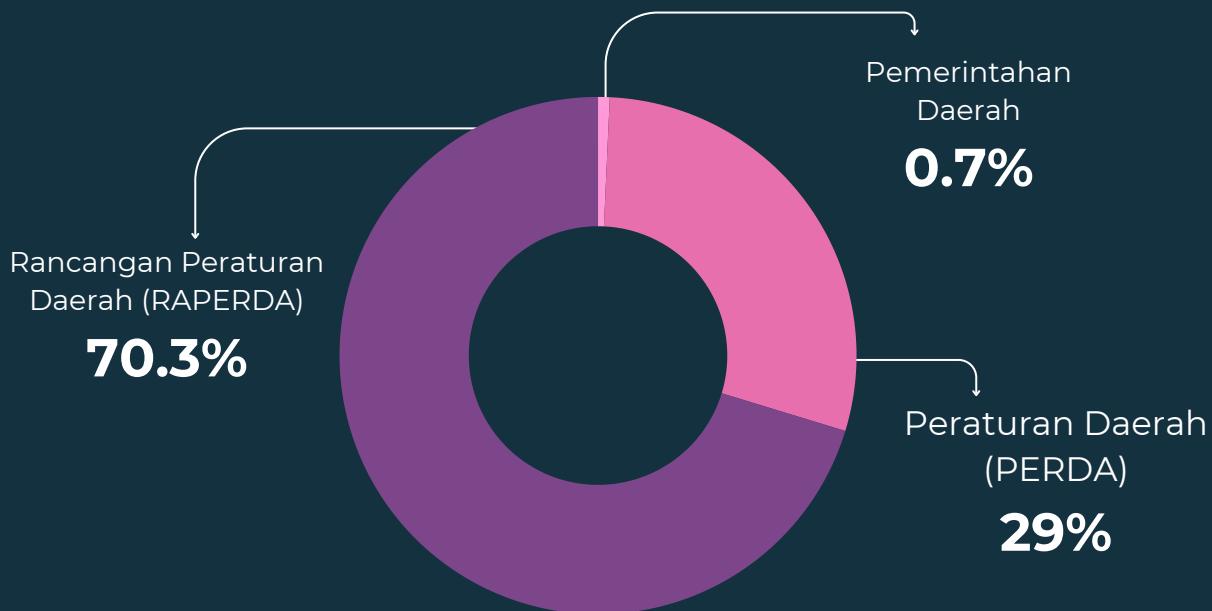


BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE 4

- 6 Lembaga Keuangan dan Perbankan**
- Mendorong regulasi pro-UMKM dan mengawasi transparansi perbankan serta peningkatan akses pembiayaan yang adil.
 - Mendorong regulasi dan pengawasan ketat agar penempatan dana Himbara transparan dan berpihak pada UMKM daerah.
 - Memperkuat pengawasan penyaluran dana Himbara dan mendorong regulasi transparansi serta akses kredit UMKM daerah.
-
- 7 Pajak dan Pungutan Lain**
- Mendorong revisi kebijakan transfer ke daerah dan memperkuat pengawasan agar distribusi anggaran lebih adil dan berkeadilan.
 - Mendorong regulasi berpihak UMKM dan memperketat pengawasan penyaluran dana agar transparan serta adil bagi daerah.
 - Memperkuat regulasi dan pengawasan perpajakan berbasis edukasi publik, penegakan kepatuhan, dan insentif yang adil.
-
- 3 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**
- Penguatan PAD daerah melalui inovasi fiskal, data, teknologi, dan dukungan pusat.
 - Mendorong fasilitasi teknologi, infrastruktur digital, dan pelatihan untuk percepatan e-pelaporan.
 - DPD RI mendorong regulasi dan mengawasi efektivitas kebijakan fiskal daerah.
-
- 4 Perindustrian dan Perdagangan**
- Penguatan PAD daerah melalui inovasi fiskal, data, teknologi, dan dukungan pusat.
 - Mendorong fasilitasi teknologi, infrastruktur digital, dan pelatihan untuk percepatan e-pelaporan.
 - DPD RI mendorong regulasi dan mengawasi efektivitas kebijakan fiskal daerah.
-
- 4 Perindustrian dan Perdagangan**
- Mendorong regulasi stabilisasi harga dan memperkuat pengawasan distribusi pangan
 - Mendorong pengawasan ketat dan regulasi stabilisasi harga pangan.
 - Mendorong penguatan koordinasi dan pembaruan data statistik perbatasan.



ASPIRASI KOMITE IV



1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Terkait Ketahanan Pangan, di dalam nya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- DPD RI mendorong standar nasional dan pengawasan ketat keamanan pangan MBG serta mendorong standar regulasi dan mengawasi transparansi mitra MBG.
- DPD RI mendorong percepatan MBG melalui pengawasan anggaran dan regulasi pelaksanaan daerah.
- DPD RI mendorong regulasi, pengawasan mitra, dan percepatan implementasi MBG merata.



2. Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi



- DPD RI mendorong regulasi kemitraan BULOG-koperasi dan mengawasi program pembinaan terpadu.
- DPD RI mendorong regulasi subsidi bunga dan mengawasi kebijakan kredit Himbara.
- DPD RI mendorong regulasi dan pengawasan penguatan UMKM melalui akses modal, pelatihan, dan perluasan pasar.
- DPD RI mendorong regulasi dan pengawasan agar Pemda melibatkan organisasi kepemudaan dalam program sosial, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat.

**ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
AGENDA
PRIORITAS**

BIDANG TUGAS LAINNYA BULD

1 Pemerintahan Daerah

- Mendorong pengawasan kinerja dan percepatan pemenuhan target layanan gizi.

2 Peraturan Daerah

- Memperketat pengawasan dan standar transparansi mitra pelaksana.
- Dorong regulasi dan awasi penguatan koperasi sebagai mitra BULOG.
- Mendorong kebijakan bunga ringan UMKM melalui pengawasan Himbara.

3 Rancangan Peraturan

- Memperketat pengawasan dan mendorong standar operasional higienis yang konsisten.
- Mendorong regulasi dan pengawasan standar gizi serta tenaga ahli daerah.
- Mendorong regulasi dan pengawasan percepatan pelaksanaan program MBG.





Hasil **PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH**



◆ Pada Masa Kegiatan Anggota Ke Daerah Pemilihan
Periode 2 Oktober - 21 Oktober 2025

MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025-2026